

Sejarah deforestasi di Indonesia

Selasa, 22 April 2008

Oleh: Mohammad Fathi Royyani, Herbarium Bogoriense, Puslit Biologi

Hampir seluruh masyarakat dunia akhir-akhir ini merasa khawatir akan kelangsungan kehidupannya karena adanya ancaman perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi karena adanya perkembangan teknologi yang tidak terkendali dan merusak lingkungan. Di samping itu, ancaman perubahan iklim juga terjadi dikarenakan hutan sebagai penyerap karbon mengalami degradasi yang pesat. Sepesat perkembangan teknologi dan nafsu keserakahan manusia.

Salah satu negara yang laju kerusakan hutannya parah adalah Indonesia. Di negara ini, cadangan hutan tropis, sebagai penyerap karbon yang efektif, setiap saat mengalami laju kerusakan. Bahkan, saking parahnya laju kerusakan hutan di Indonesia membuat lembaga Guinness of Record berencana menganugerahi negara Indonesia sebagai penerima penghargaan (baca=sindiran).

Tulisan ini hendak menjelaskan sejarah deforestasi di Indonesia, karena pada dasarnya deforestasi telah berlangsung lama. Dan bila merujuk pada sejarah kerusakan lingkungan dari praktek deforestasi akan terlihat bahwa deforestasi yang terjadi di Indonesia terkait dengan dinamika perkembangan masyarakat Eropa. Revolusi Perancis kemudian disusul dengan revolusi industri di Inggris berdampak cukup signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat Eropa. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan akhirnya industri membutuhkan banyak baku yang diperoleh dari bangsa-bangsa yang ada di Asia dan Amerika Latin.

Selama ini kita mengenal Kawasan nusantara pada abad pertengahan adalah produsen rempah-rempah yang memenuhi kebutuhan dunia akan sumber alam tersebut. Namun terdapat aktifitas yang belum banyak diungkap, yakni terjadinya praktek penjualan kayu gelondongan untuk berbagai kebutuhan bahan bangunan. Menurut Brascamp (1925) pada tahun 1681 sudah ada praktek penjualan kayu untuk negeri Belanda.

Selama ini yang kita lebih mengenal kawasan nusantara pada abad pertengahan sebagai produsen rempah-rempah yang memenuhi kebutuhan dunia akan sumber alam tersebut. Akan tetapi terdapat satu sisi sejarah yang belum banyak diungkap oleh orang, yakni selain sebagai produsen rempah, nusantara juga telah melakukan ?ekspor? kayu gelondongan untuk pembangunan di Belanda.

Sejarah Deforestasi di Indonesia

Pra-kolonialisme

Pada masa kerajaan, telah ada praktek penebangan hutan alami untuk dijadikan tanaman ?industri?, walaupun belum semasif periode

setelahnya. Hal ini diketahui dari telah adanya hutan jati di nusantara. Jati (*Tectona grandis*) oleh beberapa kalangan dinyatakan sebagai tumbuhan bukan asli Indonesia. Heyne juga mencatat bahwa pada tahun 1671 telah ada hutan jati di Sulawesi. Menurutnya ada sekitar 7.000 ha di Pulau Muna dan 1.000 ha di pedalaman Pulau Butung di Teluk Sampolawa. Heyne kemudian menduga bahwa jati sesungguhnya terdapat pula di Pulau Kabaena, serta di Rumbia dan Poleang, di Sulawesi Tenggara. Dari analisis DNA diketahui bahwa jati yang terdapat di Sulawesi merupakan perkembangan dari jati Jawa.

Informasi keberadaan hutan jati di Sulawesi pada abad tersebut selaras dengan laporan yang dibuat para penjelajah. Pada masa pra-kolonialisme, telah ada praktek penjualan kayu gelondongan jati dari nusantara ke bangsa-bangsa lainnya. Menurut informasi dari seorang penjelajah dari Portugis, Marcopolo, pada awal abad 15, telah ada praktek jual beli kayu gelondongan untuk pembuatan kapal-kapal dan pembangunan pelabuhan.

Masa Kolonialisme

Kerusakan hutan alam di Indonesia telah lama terjadi. Berdasarkan penelusuran sejarah, pada masa kolonial Belanda telah marak kerusakan lahan akibat dari eksploitasi alam. Pada masa Belanda ini, kerusakan hutan terjadi karena pertama, penebangan hutan untuk diambil kayunya, kedua, alih fungsi lahan untuk perkebunan, ketiga, desakan penduduk dan dibukanya akses jalan.

Pada pemerintahan Belanda, sumberdaya alam yang dimiliki nusantara banyak yang diangkut ke negeri Belanda. Praktek eksploitasi sumberdaya alam yang dilakukan oleh VOC maupun pemerintah Belanda setelah mengambil alihnya dari VOC pada awalnya dengan melibatkan orang-orang kerajaan.

Menurut Brascamp (1923) pada tahun 1687 Van Dijck sengaja dikirim untuk membuat memorandum dengan putra sultan di Cirebon, isi memorandum diantaranya adalah tentang pembatasan dan supply kayu. Tindakan pengiriman utusan untuk melakukan negosiasi dengan kerajaan terkait eksploitasi sumberdaya alam (penebangan hutan) juga hampir terjadi di semua kerajaan yang ada di nusantara.

Dalam perjanjian yang dibuat pihak kerajaan selalu dirugikan. Brascamp juga menjelaskan tentang adanya manipulasi VOC terhadap sultan terkait banyak kelayakan. Salah satunya kompeni untuk penebangan pohon yang menunjukkan bahwa penebang dibuat mendapat bayaran. Inilah era dimulainya blandong system.

Senada dengan Brascamp adalah kajian yang dilakukan oleh Kalff (1928) yang meliputi tentang sejarah produksi kayu di Jawa dari masa kolonial pada periode 1650 sampai dengan 1920, seperti; pembahasan mengenai produksi kayu, manajemen hutan, perilaku buruh, dan surat kepemilikan.

Kerusakan hutan alami di Indonesia juga terjadi karena kebijakan tanam paksa yang dikeluarkan pemerintah Belanda tahun 1830-an. Kebijakan ini muncul karena Belanda mengalami kesulitan ekonomi terkait dengan perang Jawa 1825-1830. Dengan kebijakan tanam paksa, Belanda berharap akan cepat memperoleh dana segar untuk pembangunannya. Menurut

Gorkom (1874) sejak tahun 1870 banyak lahan yang hilang akibat konsesi untuk agriculture. Bahkan ia berpendapat adanya masalah bencana banjir bukan saja karena terjadinya deforestation yang mengakibatkan masalah perairan, melainkan juga karena adanya peningkatan luapan air sungai yang justru terjadi karena curah hujan yang rendah dan konsumsi air oleh agriculture.

Kebijakan tanam paksa ini pada satu sisi menguntungkan namun di sisi lain justru makin menyengsarakan. Dari kebijakan tanam paksa ini Belanda memperoleh keuntungan yang berlipat sedangkan petani sebagai tulang punggung pelaksana dari kebijakan tersebut tetap berada dalam kondisi yang tidak berdaya. Untuk produksi kopi misalnya, para pembeli mematok harga ke petani hanya Rp.6 per pikul, sedangkan mereka mengeksport dengan harga Rp.36 sampai dengan Rp.40 per pikul sehingga mendapatkan keuntungan sebesar 6 atau 8 kali harga petani (Dorleans 2006;443).

Dengan keuntungan perkebunan (tanam paksa) yang menggiurkan, Belanda berhasil menarik investor-investor untuk menanamkan modalnya pada usaha perkebunan yang dirintis Belanda. Masuknya berbagai investor juga pada akhirnya melahirkan perusahaan-perusahaan perkebunan. Kondisi ini memacu pertumbuhan jumlah penduduk, yang tentu saja kebutuhan akan lahan pun meningkat dengan sendirinya.

Setelah perkebunan marak, kebutuhan akan akses jalan yang mudah lahir, maka kemudian pada periode Gubernur Jenderal Dandels (1808-1811) membuka jalan yang menghubungkan pulau Jawa. Jalan yang dibuat Daendels ini memiliki panjang 1000 KM. Dibukanya jalan darat oleh Gubernur Jenderal Dandels tidak saja berdampak pada menyusutnya daerah resapan juga memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Bahkan, Pramudya Ananta Toer menyebutnya sebagai Gnoside karena selama pengerjaan jalan ini menghilangkan nyawa pekerja kurang lebih 12 ribu jiwa. Kemudahan akses jalan membuat keuntungan perusahaan perkebunan meningkat secara signifikan. Antara tahun 1841-1863 ada keuntungan bersih 461 juta gulden dan antara tahun 1836-1866 ada 692, antara 1867-1877 ada 151 juta gundel.

Untuk menggambarkan kondisi penebangan hutan Indonesia yang dilakukan oleh Belanda pada masa lalu, maka kita patut mencermati tulisan dari Dick van Hogendrop seperti yang dikutip oleh Raffles (1817) yang lantang mengatakan; Orang-orang Batavia! Terpesonalah dengan apa yang kukatakan. Armada kita telah dihancurkan, perdagangan kita telah dimusnahkan, pelayaran kita pasti akan hancur-kita sudah membeli kayu dan bahan-bahan lain untuk membangun kapal dari Negara-negara di barat dengan harta yang tidak ternilai, sementara itu kita tinggalkan ?skwadron? hutan jati yang berdiri tegak dengan akarnya di atas tanah. Benar hutan jati di Jawa memiliki kayu yang cukup untuk membangun armada dan juga kapal-kapal perdagangan sebanyak kita butuhkan?meskipun sering ditebang, hutan-hutan di Jawa tumbuh secepat penebangan yang dilakukan, dan tidak akan pernah habis jika dipelihara dan dikelola dengan baik (Whitten 1999; 591).

Maraknya penebangan hutan dan alih fungsi lahan pada masa Belanda, menimbulkan banyak bencana. Pada masa itu telah ada perdebatan dan juga seruan untuk menjaga lingkungan. Hilangnya hutan dan munculnya berbagai bencana memunculkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan. Walaupun sering terjadi beberapa bencana di daerah, namun tampaknya pemerintah Belanda belum mau menghentikan aktifitas penebangan, bahkan mereka merumuskan suatu strategi untuk mendapatkan kayu sekaligus juga penyelamatan lingkungan.

Daftar Bacaan

- Boomgard, P. 2004. Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880. Jakarta: Djambatan-KITLV.
- Brascamp, E. H. B., 1923. Het Contract met den Soesoehoenan van 5 october 1705 en de Houtleverantie (The Contract with the Susuhunan of 5 October, 1705 and the Wood Supply). Tectona 16: 636-642 (NI).
- Dorlens, B., 2006. Orang Indonesia dan Orang Perancis dari Abad XVI Sampai Dengan Abad XX. Jakarta; Kepustakaan Populer Gramedia.
- Heyne, K. 1987. Tumbuhan Berguna Indonesia Jilid IV. Badan Litbang Kehutanan (penerj.). Jakarta: Yayasan Sarana Wana Jaya.
- Kalff, S., 1928. Houtcultuur op Java. (Wood Production in Java). De Indische Culturen 13: 838-844 (NI).
- Lombard, D.2005. Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah terpadu, Jilid I, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, Forum Jakarta-Paris, Ecole Francaise d'Extreme-Orient.
- Ricklefs, M.C., 1981. Sejarah Indonesia Modern 1200--2004, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Romunde, Van., 1879. Nog iets Over Ontwouding, Hare Oorzaken en Gevolgen (Remarks about the Causes and Effects of Deforestation). T.N. & L. 24: 109-124 (NI).
- Gorkom, K.W. van, 1874. Een Woord Over de Ontwouding van Java (Remarks about the Deforestation in Java for Land Reclamation). T.N.&L. 19: 382-421.
- Whitten, T, R.E. Soeriaatmadja, Suraya A. Afiff., 1999. Ekologi Jawa dan Bali. Jakarta: Prenhallindo.